

Kapitalisme dan Ekonomi Islam: Sejarah, Karakteristik, Serta Perbedaan Sistem Ekonomi

Malika Azzahra¹, Maulidatul Khusnah², Intan Maulidia³, Adinda Fatchiana Salsabila⁴, Arifatul Fi Ilmiah⁵, Dhini Septya Ramadhani⁶, Shafina Dwi Rahmawati⁷, Taufiq Kurniawan⁸

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis sistem ekonomi kapitalisme berdasarkan perkembangan, mekanisme, karakteristik serta prinsip kepemilikan dengan bertujuan untuk kesejahteraan Masyarakat. Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode *Library Search* atau studi kepustakaan. Data data diperoleh oleh literatur seperti buku, jurnal, artikel kemudian diteliti berdasarkan metode deskriptif-komperatif. Hasil kajian menjelaskan bahwa kapitalisme menekankan persaingan bebas, kebebasan individu, mekanisme pasar, dan pencapaian keuntungan. Sedangkan ekonomi Islam berlandaskan pada sifat *Al-Adl*. Prinsip-prinsip keislaman yang sesuai dengan syariat dan tauhid. Ekonomi Islam menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab sosial dan kepentingan individu. Dengan demikian, ekonomi Islam tetap mengakui kepemilikan pribadi akan tetapi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip nilai syariat seperti larangan riba, halal-haram, serta kewajiban dalam berzakat.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi, Kapitalisme, Distribusi Kekayaan, Sistem Kepemilikan.*

Abstract

This article aims to explain and analyze the capitalist economic system based on its development, mechanism characteristics, and principles of ownership with the goal of societal welfare. In this research, we use qualitative methods with library research (literature study) methods. Data were obtained from literature such as books, journals, and articles, and then analyzed using a descriptive-comparative method. The study result explain that capitalism emphasizes free competition, individual freedom, market mechanism, and profit achievement. Where as Islamic economics is based on the principle of justice, Islamic principles that align with Sharia and monotheism. Islamic economics balances economic growth, social responsibility, and individual interest. Thus, Islamic economics still recognizes private

^{1,2,3,4,5,6,7,8} S1 Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya,
26081194152@mhs.unesa.ac.id, 26081194185@mhs.unesa.ac.id,
26082194036@mhs.unesa.ac.id, 26081194135@mhs.unesa.ac.id,
26081194013@mhs.unesa.ac.id, 26081194043@mhs.unesa.ac.id,
26081194093@mhs.unesa.ac.id, taufiqkurniawan@unesa.ac.id

ownership, but is based on the principles of Sharia values such as the prohibition of usury, halal-haram, and the obligation of zakat.

Keyword: *Islamic Econommics, Economics System, Capitalism, Wealth Distribution, Ownership System*

PENDAHULUAN

Sistem Ekonomi memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, karena sistem tersebut menentukan bagaimana sumber daya digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam perkembangannya, terdapat berbagai sistem ekonomi yang memiliki dasar pemikiran, tujuan, serta mekanisme yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan ini pada dasarnya bersumber dari cara pandang yang berbeda terhadap kedudukan individu, peran negara, serta tujuan akhir dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Dua sistem yang kerap dibandingkan karena perbedaan filosofinya yang mendasar adalah kapitalisme dan ekonomi Islam.

Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang menekankan kebebasan individu, kepemilikan pribadi, mekanisme pasar, persaingan, serta pencapaian keuntungan sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi. Pemikiran kapitalisme modern sering dikaitkan dengan gagasan Adam Smith melalui konsep *invisible hand*, yaitu gagasan bahwa individu yang mengejar kepentingan pribadinya dalam pasar bebas secara tidak langsung akan mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tanpa perlu campur tangan negara yang berlebihan (Smith, 1776). Gagasan ini kemudian berkembang lebih jauh, di mana kapitalisme modern juga banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya tertentu, seperti etos kerja keras dan hidup hemat, yang pada gilirannya memperkuat keyakinan bahwa peran pemerintah dalam perekonomian sebaiknya diminimalkan agar mekanisme pasar dapat bekerja secara lebih efisien.

Meskipun dipandang mampu mendorong efisiensi dan pertumbuhan, kapitalisme tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik paling mendasar datang dari Marx (1867), yang menyatakan bahwa sistem ini berpotensi menciptakan eksploitasi terhadap kaum buruh (proletar) oleh pemilik modal (*bourjuis*), karena nilai lebih (*surplus value*) dari hasil kerja buruh diambil oleh pemilik modal sebagai keuntungan. Kritik semacam ini menunjukkan bahwa di balik efisiensi yang ditawarkan kapitalisme, terdapat persoalan mendasar terkait ketimpangan hubungan antara pemilik modal dan pekerja, yang pada akhirnya dapat memicu kesenjangan sosial jika tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai.

Berbeda dengan kapitalisme, ekonomi Islam memiliki landasan yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan dan rasionalitas material, melainkan juga berpedoman pada nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam. Mannan (1986) mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, sehingga aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aspek etika dan moral. Sejalan dengan itu, Chapra (1992) menekankan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan *maqashid syariah*,

yaitu kesejahteraan manusia (*falah*) yang mencakup kebutuhan material maupun spiritual, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam kerangka ini, aktivitas ekonomi tidak hanya diarahkan pada pencapaian kesejahteraan duniawi, tetapi juga pada nilai moral dan tanggung jawab sosial, termasuk melalui instrumen seperti zakat yang berfungsi mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu dan mendorong pemerataan di tengah masyarakat.

Perbedaan antara kapitalisme dan ekonomi Islam pada dasarnya tidak hanya terlihat pada praktik ekonominya, tetapi juga pada landasan filosofis dan tujuan yang mendasarinya. Kapitalisme memberi ruang luas bagi kepemilikan pribadi dan mekanisme pasar dalam menentukan arah aktivitas ekonomi, sedangkan ekonomi Islam tetap memberikan kebebasan berekonomi namun dibatasi oleh prinsip dan ketentuan syariat demi menjaga keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Perbedaan mendasar ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat kedua sistem sama-sama mengklaim mampu mewujudkan kesejahteraan, namun melalui pendekatan yang sangat berbeda. Oleh karena itu, pembahasan mengenai "Kapitalisme dan Ekonomi Islam: Sejarah, Karakteristik, serta Perbedaan Sistem Ekonomi" diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kedua sistem, karakteristik utama yang membedakannya, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat historis-komparatif. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang dan perkembangan sistem kapitalisme serta ekonomi Islam, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan mendasar di antara keduanya. Desain merujuk pada pola kajian dalam penelitian terdahulu yang membandingkan sistem ekonomi Islam dengan sistem kapitalis melalui telaah konsep dan nilai dasar (Muslim, 2012; Abbas, 2012), termasuk kajian kapitalisme dalam bingkai ekonomi syariah (Budiman, 2014) dan perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem kapitalis maupun sosialis (Effendi, 2019).

Objek penelitian ini adalah dokumen dan literatur ilmiah yang membahas tiga aspek utama sesuai dengan fokus judul, yaitu sejarah kemunculan dan perkembangan kapitalisme dan ekonomi Islam, karakteristik masing-masing sistem, serta perbedaan di antara keduanya. Sumber yang dikaji antara lain kajian sistem ekonomi Islam dalam perbandingan (Bakhri, 2012), pendekatan filsafat dan nilai dasar ekonomi Islam (Abbas, 2012), kapitalisme ekonomi syariah (Budiman, 2014), keistimewaan fikih muamalah dibandingkan dengan mekanisme sistem ekonomi lain (Mustakim & Setiawan, 2019), *maqasid* syariah sebagai landasan tujuan ekonomi Islam (Algifari & Andrini, 2024), serta gambaran umum keuangan Islam dari perspektif internasional (Hussain, Shahmoradi, & Turk, 2015). Kajian perbandingan multisistem (Adam, Hamin, & Hasim,

2024; Effendi, 2019) digunakan sebagai pelengkap analisis untuk mempertegas posisi kapitalisme di antara sistem ekonomi lain.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi (studi pustaka) dengan menelusuri sumber tertulis yang memuat data historis dan konseptual tentang kapitalisme dan ekonomi Islam. Penelusuran diarahkan pada tiga kategori data, yakni data historis mengenai asal-usul dan perkembangan sistem; data karakteristik, meliputi prinsip kepemilikan, mekanisme pasar, peran negara, dan landasan nilai; serta data komparatif yang memuat titik temu dan titik beda kedua sistem. Pola penelusuran ini mengikuti pola ekstraksi data pada kajian sejenis (Muslim, 2012; Mustakim & Setiawan, 2019). Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang dibantu dengan pedoman berupa matriks analisis dokumen berisi indikator landasan filosofis, konsep kepemilikan, mekanisme pasar, peran negara, dan tujuan (*maqasid*) ekonomi. Seluruh indikator tersebut diadaptasi dari perbandingan pada penelitian sebelumnya (Muslim, 2012; Effendi, 2019; Algifari & Andrini, 2024).

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif-komparatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data historis disusun secara kronologis, data karakteristik dipetakan per sistem, kemudian keduanya dibandingkan untuk merumuskan perbedaan mendasar antara kapitalisme dan ekonomi Islam, mengikuti pola analisis komparatif pada kajian sejenis (Adam, Hamin, & Hasim, 2024; Algifari & Andrini, 2024). Melalui tahapan ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan gambaran mengenai sejarah, karakteristik, dan perbedaan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penjelasan Sistem Ekonomi Kapitalisme

Berdasarkan tinjauan pustaka Ibrahim et al., (2025) yang merangkum pandangan berbagai penulis, kapitalisme dapat dipahami sebagai sistem ekonomi yang menempatkan kebebasan individu sebagai fondasi utama dalam penguasaan faktor produksi. Dalam sistem ini, persaingan di pasar berperan sebagai penggerak bagi para pelaku ekonomi yang berusaha meraih keuntungan setinggi mungkin (Adam et al., 2024). Dari sisi filosofis, kapitalisme berpijak pada individualisme dan kebebasan pasar, sehingga kepemilikan atas sumber daya ekonomi berada di tangan pribadi, bukan dikuasai bersama oleh masyarakat atau negara. Pembagian kekayaan pun tidak ditentukan oleh pihak tertentu, melainkan diserahkan pada mekanisme pasar tanpa pijakan moral yang mengikat. Dengan demikian, tujuan pokok yang dikejar dalam sistem ini adalah perolehan laba dan pembukaan modal (Ibrahim et al., 2025).

Kapitalisme kerap dipandang unggul karena mampu melahirkan inovasi, meningkatkan efisiensi produksi, dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Wibawanti & Jaharuddin, 2022). Namun, pertumbuhan tersebut sering dicapai dengan mengorbankan pemerataan,

sehingga tidak semua lapisan masyarakat menikmati hasilnya secara seimbang (Dwiatmaja et al., 2023). Fokus yang terlalu besar pada materi juga dinilai membentuk pola perilaku ekonomi yang hedonistik, sekuler, dan eksploitatif (Khoiry et al., 2023). Dampaknya tampak pada kesenjangan sosial yang kian melebar, kerusakan lingkungan, serta dominasi segelintir elite ekonomi atas sebagian besar masyarakat (Jailili et al., 2022). Krisis ekonomi yang terjadi berulang kali turut memperlihatkan adanya kelemahan struktural dalam sistem ini. Kelemahan tersebut sulit diatasi tanpa campur tangan regulasi yang kuat (Wibawanti & Jaharuddin, 2022). Meskipun memiliki banyak kekurangan, kapitalisme tetap bertahan karena dianggap paling mampu beradaptasi dengan perubahan global (Ariby et al., 2024). Karena itu, pengembangannya perlu diarahkan agar lebih inklusif melalui penerapan prinsip tanggung jawab sosial. Upaya ini diharapkan dapat menekan dampak negatif yang selama ini ditimbulkannya (Adam et al., 2024).

2. Penjelasan Sejarah Sistem Ekonomi Kapitalisme

Ilmu ekonomi berkembang sebagai kajian yang membahas bagaimana sumber daya yang jumlahnya terbatas dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beragam. Kondisi keterbatasan tersebut membuat individu maupun masyarakat harus menentukan berbagai keputusan ekonomi, mulai dari jenis barang yang akan diproduksi, hingga bagaimana hasil tersebut didistribusikan dari waktu ke waktu. Selain itu, keputusan ekonomi juga diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dan meningkatkan kapasitas produksi. Dalam perkembangannya, terdapat berbagai sistem ekonomi yang dikenal secara luas, di antaranya sistem kapitalisme dan sosialisme (Huda, 2016).

Perkembangan sistem ekonomi kapitalis memiliki kaitan erat dengan terjadinya Revolusi Industri yang membawa perubahan besar dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Kehadiran industri, pabrik, serta penggunaan produksi mesin dalam skala besar mengubah pola masyarakat dalam menghasilkan dan memperoleh barang. Perubahan tersebut turut mendorong berkembangnya kapitalisme, yang menyebabkan kekayaan dan kekuatan ekonomi semakin terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kondisi ini kemudian menimbulkan kritik karena orientasi terhadap peningkatan keuntungan terkadang lebih diutamakan dibandingkan dengan aspek moral dan sosial. Sejalan dengan semakin luasnya penerapan kapitalisme, pemerintah memiliki peran yang semakin diperlukan melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, melindungi kepentingan masyarakat, serta menciptakan kondisi persaingan yang lebih sehat dalam pasar (Huda, 2016).

Adam Smith dikenal luas sebagai bapak kapitalisme, sosok yang muncul di tengah pesatnya perkembangan sistem ekonomi ini. Kapitalisme sendiri sebenarnya telah lahir jauh sebelumnya, tepatnya pada abad ke-16,

seiring tumbuhnya industri tekstil di Inggris yang ditopang oleh pasokan bahan baku wol dalam negeri. Titik balik penting terjadi saat Revolusi Industri yang terjadi di Inggris. Pada masa inilah pola dominasi modal mengalami pergeseran drastis, dari yang semula dikuasai modal perdagangan, beralih dan dikendalikan oleh modal industri. Pergeseran tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, namun berdampak besar terhadap struktur ekonomi saat itu. Adam Smith menjelaskan pentingnya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi, kepemilikan pribadi, pembagian kerja, persaingan, dan mekanisme pasar. Pemikirannya kemudian berpengaruh terhadap perkembangan kapitalisme modern, terutama setelah terjadinya Revolusi Industri di Inggris (Huda, 2016).

3. Penjelasan Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang secara spesifik mengatur dan memandu aktivitas ekonomi dengan berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam. Sebagai sebuah disiplin ilmu, ekonomi Islam memiliki karakteristik yang unik, karena tidak hanya mengedepankan aspek material dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan dimensi spiritual sebagai bagian yang tak terpisahkan (Afdhal, et al., 2022). Dalam pandangan ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Ini berarti bahwa setiap aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai etika dan moral yang diatur dalam ajaran Islam. Konsep ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung memisahkan antara urusan duniawi dengan agama, atau bahkan menitikberatkan pada pencapaian keuntungan materi semata (Hendrianto & Praja, 2021; Mujahidin, 2019).

Para ahli ekonomi Islam menjelaskan bahwa ekonomi Islam didasarkan pada beberapa prinsip fundamental yang bersumber dari Alqur'an dan Hadis. Misalnya, Alqur'an menyebutkan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi, serta larangan terhadap praktik riba (bunga) yang dianggap merugikan salah satu pihak. Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan pedoman praktis tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya menjalankan aktivitas ekonominya, baik dalam perdagangan, pengelolaan harta, maupun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Capra, 2020; Sukoco, 2021).

Beberapa tokoh ekonomi Islam, seperti Muhammad Baqir al-Sadr dan M.A. Mannan, menekankan bahwa ekonomi Islam harus dipahami sebagai sistem yang integral, di mana aspek-aspek spiritual dan moral tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Al-Sadr, misalnya menyatakan bahwa ekonomi Islam berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial dan mendistribusikan kekayaan secara merata di kalangan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam (Afdhal et al., 2023; Afdhal et al., 2022). Sementara itu, M.A. Mannan menekankan bahwa ekonomi

Islam bertujuan untuk mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang, dengan mekanisme seperti zakat dan wakaf yang diatur dalam Islam untuk mendukung kesejahteraan umum.

Pengertian ekonomi Islam ini tidak hanya menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka, tetapi juga menawarkan sebuah alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat global. Sebagai sebuah sistem yang mengutamakan kesejahteraan holistik, ekonomi Islam hadir untuk menjawab tantangan-tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi dunia saat ini dengan menawarkan solusi yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan yang luhur (Afdhal & Alkarimah, 2014; Sari et al., 2022). Dengan demikian, ekonomi Islam bukan hanya sekadar alat untuk mencapai keuntungan materi, tetapi juga sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan sesuai dengan tujuan penciptaan manusia menurut ajaran Islam.

4. Perbedaan Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Islam

Antara sistem ekonomi yang satu dengan yang lain pasti memiliki perbedaan untuk menjadi poin utamanya. Adapun perbedaan mendasar yang dimiliki antara ekonomi Islam dan ekonomi kapitalisme terletak pada penekanan prinsip-prinsip etika dan keadilan sosial. Sedangkan, ekonomi kapitalisme lebih menekankan pada memperbanyak keuntungan dan memusatkan kekayaan pada individu. Sehingga, ekonomi Islam memasarkan distribusi kekayaan dengan adil dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tidak berpusat pada satu titik, yang bertolak belakang dengan ekonomi kapitalis. Berikut perbedaannya :

a. Kebebasan

Ekonomi Islam memberikan kebebasan pada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dan menikmati hasil dari usahanya. Akan tetapi juga memberi aturan bahwa usaha tersebut halal dan sah tidak mengandung sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga, menjadikan individu tidak memiliki kebebasan secara penuh, akan tetapi juga melihat etika dan syariat agama Islam. Sedangkan, dalam ekonomi kapitalisme setiap individu bebas melakukan kegiatan apa saja terhadap harta yang diusahakan untuk kepentingan individual guna mendapatkan nilai guna materi tanpa mempertimbangkan etika dan kelayakan untuk semua masyarakat (Effendi, 2019).

b. Hak Terhadap Harta

Dalam sistem ekonomi Islam setiap individu memiliki hak kepemilikan terhadap hartanya dan hak menikmati hasil usaha tersebut. Akan tetapi, terikat dengan moral agar kekayaan tidak hanya diperoleh bagi orang-orang kaya saja tetapi merata keseluruhannya seperti mengeluarkan zakat. Sementara itu, dalam sistem ekonomi kapitalisme, setiap individu memiliki hak kepemilikan terhadap harta dan hasil usahanya secara mutlak. Selain itu, ekonomi kapitalisme juga memiliki hak untuk menggunakannya dengan cara yang dikehendaki (Effendi, 2019).

c. Distribusi Kekayaan

Melalui zakat dan mekanisme distribusi lainnya, Sistem ekonomi Islam mencegah penumpukan harta pada kelompok tertentu, seperti orang kaya saja, tetapi menganjurkan pemerataan pada semua lapisan masyarakat. Sehingga, ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Sementara itu kapitalisme cenderung memberi peluang lebih besar bagi pemilik modal, sistem kapitalisme dimana harta dan hasil dari suatu usaha hanya berpusat pada kelompok tertentu, yaitu kelompok yang memiliki kekuasaan dan modal besar (Effendi, 2019).

d. Kesejahteraan Individu dan Persaingan Bebas

Islam mengusahakan kesejahteraan yang merata antara individu dan masyarakat tanpa adanya pertentangan dari kedua pihak. Islam meredakan suatu masalah dan mewujudkan kemaslahatan untuk semuanya. Sementara itu, persaingan bebas dalam sistem kapitalisme di antara individu-individu akan mewujudkan tingkat produksi dengan tingkat harga yang wajar. Persaingan bebas akan mempertahankan tingkat keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional tanpa melihat kesetaraan dan kesejahteraan (Effendi, 2019).

e. Ketidaksamaan Ekonomi

Islam mengakui ketidaksamaan ekonomi di antara masyarakat dalam batas yang wajar. Sehingga, orang kaya diwajibkan untuk memberikan hartanya kepada orang miskin dalam bentuk zakat dari hasil usahanya agar kekayaan tersebut menjadi rata kepada masyarakat secara menyeluruh. Kemudian untuk sistem ekonomi kapitalisme, persaingan bebas yang menjadi dasar sistem ini mengakibatkan semangat bersaing antar individu dan mereka hanya mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa melihat kesejahteraan bersama yang mengakibatkan ketidaksamaan dalam ekonomi (Effendi, 2019).

f. Jaminan Sosial

Setiap individu mendapatkan hak untuk hidup dalam agama Islam, serta memperoleh perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya dalam suatu negara. Oleh karena itu, suatu negara memiliki peran penting dalam menjamin hak dan kebutuhan dasar bagi setiap warganya, sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab bagi negara Islam untuk memberikan jaminan tersebut kepada masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan warganya dapat memperoleh kebutuhan hidup yang diperlukan. Sementara itu, dalam sistem ekonomi kapitalisme, tidak terdapat jaminan sosial yang secara eksplisit menjadi tanggung jawab sistem tersebut (Effendi, 2019).

5. Karakteristik Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Islam

Setiap sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu diperhatikan dengan cermat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Sistem kapitalisme dapat mendorong persaingan dan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi di sisi lain menghasilkan ketimpangan pendapatan dan eksploitasi, sedangkan ekonomi Islam berusaha menyeimbangkan antara dua kecenderungan tersebut dengan

mengutamakan praktik bisnis yang etis dan kesejahteraan sosial, namun dalam penerapannya, masih menghadapi banyak tantangan di tengah konteks ekonomi global yang masih didominasi oleh sistem konvensional (Nasrul et al., 2024).

Sistem ekonomi kapitalis memiliki beberapa ciri utama. Pertama, kebebasan kepemilikan harta secara individu. Dalam sistem ini, kepemilikan pribadi atas harta menjadi fondasi utama, sementara konsep fungsi sosial dari hak milik sama sekali tidak dikenal. Ketika kepemilikan diberikan tanpa batasan, kondisi ini mendorong setiap orang untuk mengeksploitasi sumber daya yang dikuasainya secara maksimal, yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di tengah masyarakat. Kedua, persaingan bebas (*free competition*). Kompetisi dalam sistem ini muncul di berbagai lini: antarprodusen yang berlomba menciptakan barang, antardistributor yang memperebutkan pasar penyaluran, antarpekerja yang bersaing memperoleh lapangan kerja, hingga antarpemodal dalam memperebutkan peluang investasi. Ketiga, kebebasan tanpa batas. Prinsip kapitalisme melekat erat dengan gagasan kebebasan, atau yang dikenal sebagai liberalisme (*laissez-faire*), yang dipandang sebagai kondisi paling ideal bagi berjalannya sistem ini. Liberalisme sendiri merupakan ideologi yang meyakini bahwa setiap manusia sejak lahir memiliki hak untuk menentukan dan menjalani kehidupannya sesuai kehendaknya sendiri (Budiman, 2019). Keempat, kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi. Sistem kapitalisme menempatkan kepentingan individu sebagai prioritas utama. Sebagaimana diungkapkan Adam Smith, bukan karena kebaikan hati seorang penjual daging, pembuat bir, atau pembuat roti sehingga kita bisa menikmati makanan, melainkan karena dorongan mereka untuk memenuhi kepentingan pribadi masing-masing (Smith, 1776, sebagaimana dikutip dalam Effendi, 2019). Acuanya bukanlah rasa belas kasihan mereka, melainkan kecintaan mereka terhadap diri sendiri. Kelima, mekanisme harga sebagai pengatur (*price system*). Konsep kebebasan penuh (*laissez-faire*) diyakini mampu membentuk titik keseimbangan baru yang membawa masyarakat menuju kesejahteraan. Ketika produksi suatu barang melebihi kebutuhan pasar, kelebihan tersebut secara alami akan terkoreksi melalui mekanisme pasar itu sendiri, dan begitu pula sebaliknya. Proses semacam ini pada akhirnya melahirkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal dalam perekonomian (Effendi, 2019).

Namun, persaingan bebas yang tak terbatas justru dapat mengganggu stabilitas kerja dan sistem ekonomi itu sendiri. Sebagai contoh, karena tidak ada batasan bagi setiap individu untuk mengumpulkan kekayaan, mereka semakin bersemangat dalam bersaing, yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan ekonomi di kalangan masyarakat akibat menumpuknya harta pada kelompok tertentu. Nilai-nilai moral seperti kerja sama, persaudaraan, dan saling membantu pun tidak lagi diperhatikan demi keuntungan yang hendak diperoleh. Secara singkat, sistem kapitalisme berpihak pada perolehan manfaat pribadi dengan mengesampingkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan mempromosikan keadilan dan kesetaraan dalam transaksi ekonomi, ekonomi Islam mendorong rasa persatuan dan kerja sama di antara anggota masyarakat. Penekanan pada membantu mereka yang membutuhkan melalui zakat dan bentuk amal lainnya berfungsi untuk meringankan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Pada akhirnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam berupaya membangun masyarakat di mana kesuksesan ekonomi tidak hanya diukur dari kekayaan finansial, tetapi juga dari kesejahteraan sosial dan keadilan yang dirasakan bersama. Melalui kerangka etisnya, ekonomi Islam menawarkan panduan untuk menciptakan komunitas yang lebih harmonis dan peduli, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang (Nasrul et al., 2024). Sebagai contoh, dalam masyarakat Islam, sering terlihat individu bersatu, mengumpulkan sumber daya, dan saling mendukung dalam situasi sulit, seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Semangat solidaritas dan saling membantu ini memperkuat ikatan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif.

6. Tujuan Kesejahteraan dan Kapitalisme dalam Islam

Dalam sistem kapitalisme, kesejahteraan ekonomi umumnya dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup melalui kegiatan ekonomi. Kebebasan individu, kepemilikan pribadi, mekanisme pasar, dan pencarian keuntungan menjadi bagian penting dalam sistem ini. Mekanisme pasar dapat mendorong seseorang untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas. Persaingan dan mekanisme harga diharapkan dapat mendorong efisiensi serta meningkatkan produksi. Namun, jika keuntungan dan penumpukan kekayaan menjadi tujuan utama tanpa diimbangi tanggung jawab sosial, persoalan seperti kesenjangan ekonomi dapat muncul. Hafidz (2024) menjelaskan bahwa kapitalisme lebih menekankan efisiensi pasar, kebebasan individu, dan maksimalisasi keuntungan, sedangkan ekonomi syariah memasukkan nilai keadilan sosial dan tanggung jawab moral dalam kegiatan ekonomi.

Islam memiliki pandangan yang lebih luas mengenai kesejahteraan. Kesejahteraan tidak hanya dilihat dari jumlah harta atau pendapatan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan material, sosial, moral, dan spiritual. Dalam ekonomi Islam, tujuan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan dan prinsip *maqashid al-syariah*. Karena itu, Islam tetap memberikan ruang bagi kepemilikan pribadi dan pencarian keuntungan, tetapi keduanya harus dijalankan sesuai ketentuan syariah serta memperhatikan kepentingan masyarakat. Majdina, Wijaya, dan Ezwandi (2024) menjelaskan bahwa ekonomi syariah bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan, keadilan serta keseimbangan ekonomi, sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat.

Islam tidak sepenuhnya menolak kegiatan ekonomi seperti perdagangan, kepemilikan pribadi, maupun pencarian keuntungan. Hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana harta tersebut diperoleh dan digunakan. Kekayaan tidak seharusnya hanya berputar pada kelompok

tertentu, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kegiatan ekonomi yang mendorong pemerataan serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan manfaat bagi orang lain.

Jadi, kapitalisme dalam perspektif Islam bukan berarti kebebasan ekonomi tanpa batas. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki harta dan menjalankan usaha, tetapi kebebasan tersebut disertai tanggung jawab moral dan sosial. Tujuan kegiatan ekonomi bukan hanya memperoleh keuntungan, melainkan juga menciptakan kemaslahatan, keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan yang lebih luas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam berusaha menggabungkan kegiatan ekonomi dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial, sehingga kekayaan tidak hanya dipandang sebagai alat untuk memenuhi kepentingan individu, tetapi juga sebagai amanah yang memiliki fungsi bagi masyarakat.

7. Relevansi Sistem Ekonomi Islam dalam Menghadapi Permasalahan Ekonomi Kontemporer

Perkembangan ekonomi modern menghadirkan berbagai persoalan seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, konsentrasi kepemilikan, spekulasi, serta aktivitas ekonomi yang tidak selalu mempertimbangkan dampak sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja belum cukup untuk menjamin terciptanya kesejahteraan yang merata. Dalam konteks ini, prinsip ekonomi Islam memiliki relevansi karena memberikan perhatian terhadap hubungan antara aktivitas ekonomi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga dengan bagaimana transaksi dan hubungan ekonomi dilakukan.

Salah satu instrumen yang memiliki fungsi penting adalah zakat. Zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi melalui distribusi sebagian kekayaan kepada pihak yang berhak menerimanya (Algifari & Andrini, 2024). Prinsip distribusi kekayaan dalam keuangan Islam juga berkaitan dengan upaya menciptakan solidaritas sosial dan membantu kelompok yang kurang beruntung (Hussain, Shahmoradi, & Turk, 2015). Dengan demikian, zakat dapat dipahami sebagai salah satu instrumen yang menghubungkan aktivitas ekonomi individu dengan kepentingan masyarakat. Fungsi ini menjadikan zakat berbeda dari sekadar transfer kekayaan biasa, karena kewajiban tersebut secara langsung diarahkan untuk mengurangi kesenjangan yang disebutkan pada bagian pembuka, seperti ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Dengan kata lain, zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi yang melekat secara struktural dalam sistem ekonomi Islam, bukan sekadar kebijakan tambahan yang bersifat sukarela semata.

Selain zakat, larangan riba, *gharar*, dan *maysir* menunjukkan perhatian ekonomi Islam terhadap keadilan dan kepastian dalam transaksi (Hussain,

Shahmoradi, & Turk, 2015). Sistem keuangan Islam mendorong hubungan pembiayaan yang berkaitan dengan aktivitas produktif serta pembagian risiko antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip tersebut membuat kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan produktivitas dan risiko yang muncul dalam kegiatan usaha. Jika dicermati, kedua instrumen tersebut, zakat dan larangan riba, *gharar*, dan *maysir* sesungguhnya saling melengkapi dalam merespons persoalan ekonomi kontemporer. Zakat bekerja pada sisi distribusi hasil, sementara larangan riba dan spekulasi bekerja pada sisi proses, yakni memastikan bahwa kekayaan diperoleh melalui aktivitas produktif dan risiko yang dibagi secara adil, bukan melalui akumulasi yang eksploitatif. Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang menyeluruh, karena keadilan tidak hanya dicapai di akhir (melalui redistribusi), tetapi juga dijaga sejak awal proses ekonomi berlangsung.

Dalam perkembangan ekonomi kontemporer, pendekatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. Kajian mengenai *maqashid al-syariah* menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan, keadilan sosial, pengelolaan kekayaan secara bertanggung jawab, tata kelola etis, dan keberlanjutan dapat menjadi bagian dari kerangka pembangunan ekonomi Islam (Algifari & Andrini, 2024). Oleh karena itu, ekonomi Islam dapat dipandang bukan hanya sebagai sistem alternatif dalam aktivitas keuangan, tetapi sebagai pendekatan yang berusaha menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat dan tanggung jawab sosial. Relevansi ini semakin terlihat ketika dihadapkan pada permasalahan ekonomi modern yang telah disebutkan sebelumnya, di mana pertumbuhan tanpa pemerataan justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, melalui kombinasi zakat, larangan riba, dan kerangka *maqashid al-syariah*, menunjukkan bahwa keadilan dan pertumbuhan ekonomi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat diwujudkan secara bersamaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian kepustakaan yang dilakukan melalui pendekatan deskriptif-komparatif, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi Islam merupakan dua sistem yang lahir dari akar sejarah dan landasan filosofis yang berbeda. Kapitalisme muncul sejak abad ke-16 melalui perkembangan industri sandang di Inggris dan mencapai bentuk teoretisnya yang matang pada masa revolusi industri, dengan Adam Smith sebagai peletak dasar melalui gagasan pasar bebas (*laissez-faire*) dalam karya *The Wealth of Nations* (1776). Sistem ini menekankan kebebasan mutlak individu dan perusahaan dalam memiliki modal, bersaing secara bebas, serta mengejar keuntungan pribadi tanpa campur tangan negara. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan *As-Sunnah*, menempatkan manusia sebagai *khalifah* yang bertanggung jawab mengelola harta sebagai amanah dari Allah SWT, dengan prinsip tauhid dan keadilan (*al-'adl*) sebagai inti operasionalnya.

Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut terletak pada cara memandang kebebasan ekonomi dan tujuan aktivitas ekonomi itu sendiri. Kapitalisme memberikan kebebasan penuh bagi individu untuk memiliki, mengorganisir, dan mengelola harta serta perusahaan tanpa batasan moral yang mengikat, sehingga meskipun efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi melalui mekanisme harga (*price system*), sistem ini berpotensi memicu ketimpangan sosial dan konsentrasi kekayaan pada kelompok pemilik modal, sebagaimana tercermin dari karakteristiknya yang mementingkan diri sendiri (*self-interest*). Ekonomi Islam, di sisi lain, tetap mengakui kebebasan ekonomi dan hak kepemilikan harta individu, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh aturan halal-haram serta diimbangi dengan kewajiban zakat dan larangan riba, sehingga distribusi kekayaan dapat berlangsung lebih adil dan merata di tengah masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam menghadirkan alternatif yang lebih menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kesejahteraan sosial dibandingkan kapitalisme yang cenderung berorientasi pada maksimalisasi keuntungan material semata. Ekonomi Islam tidak menolak kepemilikan pribadi maupun motif keuntungan sebagaimana dianut kapitalisme, tetapi mengarahkannya melalui nilai etika, tauhid, dan tanggung jawab sosial agar aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan duniawi, tetapi juga membawa keberkahan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya terus mengembangkan kajian dan penerapan ekonomi Islam sebagai solusi atas berbagai kelemahan struktural yang melekat pada sistem kapitalisme konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2012). Sistem ekonomi Islam: Suatu pendekatan filsafat, nilai-nilai dasar, dan instrumental. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Adam, M. N. A. S., Hamin, D. I., & Hasim. (2024). Perbandingan sistem ekonomi sosialisme, kapitalisme, dan ekonomi syariah: Sebuah analisis kritis terhadap prinsip, implementasi, dan dampak sosial. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis (JAMBURA)*, 7(2), 1011–1024. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/download/27698/9404>
- Algifari, M. A., & Andirini, R. (2024). Maqasid syariah dalam pengembangan ekonomi Islam: Analisis komprehensif dan implementasi. *Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 95–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Bakhri, B. S. (2011). Sistem ekonomi Islam dalam perbandingan. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 8(1), 42–49. <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/1536>
- Budiman, A. (2014). Kapitalisme ekonomi syariah. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 47–71. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/237>

- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Effendi, S. (2019). Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 6(2), 147–158. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/download/27698/9404>
- Hafidz, D. G. K. (2024). Contrasting capitalist and sharia economic systems: A comparative inquiry into core economic values. *Journal of Economic Studies*, 8(1), 18–30. <https://doi.org/10.32506/joes.v8i1.897>
- Huda, C. (2016). Ekonomi Islam dan kapitalisme (Merunut benih kapitalisme dalam ekonomi Islam). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 27–49. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1031>
- Hussain, M., Shahmoradi, A., & Turk, R. (2015). *An overview of Islamic finance* (IMF Working Paper No. 15/120). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781513590745.001>
- Ibrahim, E. K., Mahyarni., & Siregar, K. H. (2025). Ekonomi Islam sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme: Relevansi dan implementasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 120–140. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v3i2.521>
- Majdina, N. N., Wijaya, D. S., & Ezwandi, Y. (2024). The role of sharia economic law in poverty alleviation efforts. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 48–55.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic economics: Theory and practice*. Hodder and Stoughton.
- Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi syariah*. Prenada Media.
- Marx, K. (1867). *Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie*. Verlag von Otto Meissner.
- Muslim, M. B. (2012). Perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Mustakim, & Setiawan, H. (2019). Keistimewaan fiqh muamalah/sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 78–98. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/download/144/114>
- Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. W. Strahan and T. Cadell.